

TUMPANG TINDIH HAK PENGUASAAN ATAS TANAH DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Oleh:

Monika Febriani Pardosi¹ dan Rafael Edy Bosko²

INTISARI

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tumpang tindih hak penguasaan atas tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, pengadministrasian yang dilakukan oleh Kantor Kelurahan/Desa, Kecamatan, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, serta upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menanggulangi tumpang tindih hak penguasaan atas tanah. Jenis penelitian yang digunakan bersifat empiris. Cara memperoleh data dengan penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan guna memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber dan responden.

Kesimpulan dalam penelitian tesis ini bahwa pertama, tumpang tindih hak penguasaan atas tanah yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah disebabkan oleh berbagai faktor yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban atas tanah, kurang lengkapnya data penguasaan atas tanah di tingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan, adanya kewenangan Damang Kepala Adat dalam menerbitkan SKTA, kebutuhan atas tanah yang semakin meningkat menyebabkan munculnya para spekulan atau mafia tanah, lemahnya sistem pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, lemahnya pengawasan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, dan kurangnya koordinasi antara Kantor Pertanahan, Pemerintah, dan Lembaga Adat. Kedua, administrasi SPT yang dilakukan Kelurahan/Desa dan Kecamatan masih secara manual yaitu dengan mencatat nomor register dan tanggal ke dalam Buku Register Pertanahan dan menyimpan dokumen sebagai arsip Kelurahan/Desa dan Kecamatan sedangkan Kantor Pertanahan hanya menyimpan sebagai arsip. Ketiga, upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menanggulangi adanya tumpang tindih hak penguasaan atas tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah dengan mediasi.

Kata Kunci: Tumpang Tindih Hak Penguasaan, Upaya Penanggulangan, Kantor Pertanahan

¹ Jl. Puspakajang CT VIII/108C, Karanggayam, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

² Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

THE OVERLAPPING OF THE LAND TENURE AND THE COUNTERMEASURES EFFORT BY LAND OFFICE OF DISTRICT OF EAST KOTAWARINGIN PROVINCE OF CENTRAL BORNEO

Created by:

Monika Febriani Pardosi³ and Rafael Edy Bosko⁴

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and analyze the factors that cause overlap of land right in District of East Kotawaringin Province of Central Borneo, the administration of SPT by office of village/urban village, sub-district, and land office of District of East Kotawaringin, and also the effort taken by land office of District of East Kotawaringin to overcome the overlapping problem of the land tenure. The type of research in this study is empiric. The data have been collected from library research to get secondary data and field research to get primary data conducted by interviewing resource persons dan respondents.

The conclusion of this research, first, overlapping of land tenure in District of East Kotawaringin Timur caused by many factors, namely lack of understanding and public awareness about land obligation, incomplete data of land ownership at the village/urban village and sub-district level, the authority of Damang Traditional Chairman in issuing SKTA, the increasing need for land causes the emergence of speculators or land mafia, weak mapping system in the Land Office of District of East Kotawaringin, and lack of coordination between the Land Office, Government, and Customary Institutions. Secondly, administration of SPT at the village/urban village and sub-district level still by manual method with registering the register number and date into the register of land books then save the file of SPT as archives, whereas the land office only keep SPT as archive. Third, the efforts made by land office of District of East Kotawaringin is mediation.

Keywords: Overlapping, Countermeasures Effort, Land Office

³ Puspakajang CT VIII/108C, Karanggayam, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

⁴ Magister of Notary Faculty of Law, Gadjah Mada University